

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Terus Naik

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pertumbuhan ekonomi Surabaya terus menguat. Pasalnya, pada akhir tahun lalu pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,17 persen. Padahal, pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, ekonomi Surabaya -4,85 persen. Kemudian tahun 2021 naik jadi 4,29



Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya

persen. Tahun 2022 naik lagi menjadi 7,17 persen. "Alhamdulillah sampai bulan ini pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,17 persen, itu artinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang berada di angka 5 persen lebih," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Ia juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 7 persen itu sudah sesuai target dari Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya. Meskipun sempat ragu, namun ternyata pertumbuhan ekonomi Surabaya itu akhirnya bisa mencapai target. "Alhamdulillah, tercapai sesuai dengan target kita. Padahal, kemarin kita sempat ragu, sampai gak ya di angka 7 persen? Alhamdulillah, tercapai, dan yang tertinggi tetap dari sektor jasa karena Surabaya memang kota



SUPPORT UMKM: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau pelatihan UMKM beberapa waktu lalu.



DIGENJOT: Pemkot Surabaya terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot sektor UMKM.

jasa ya," ujarnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi itu, ia juga bersyukur karena ternyata tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun dari 9,68 persen di tahun 2021, akhirnya turun menjadi 7,62 persen di tahun 2022. "Jadi, pengangguran Surabaya turun sekitar 2 persen dan perekonomian kita naik," tegasnya. Menurut Wali Kota Eri, fakta ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan hari ini dengan sinergitas yang hebat antara semua pihak yang ada di Kota Surabaya, baik melalui padat karya, kerja sama dengan hotel dan apartemen dan program lainnya, terbukti bisa menggerakkan ekonomi Surabaya. Sebab, pertumbuhan ekonomi Surabaya itu banyak

dipengaruhi oleh geliatnya jasa yang ada di Kota Surabaya. "Makanya, saya sampaikan *matur nuwun* (terima kasih) kepada jajaran Pemkot Surabaya, warga Surabaya, seluruh investor dan pengusaha, perguruan tinggi dan semua *stakeholder* yang ada di Surabaya yang telah banyak membantu sehingga perekonomian Surabaya bisa terus naik. Sekali lagi terimakasih banyak," ujarnya. Dengan adanya sinergitas dari semua *stakeholder* itu, akhirnya yang selama ini pengangguran bisa bekerja, karena mereka juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bergeraklah perekonomian Surabaya. Wali Kota Eri juga sangat yakin

perekonomian Surabaya bisa lebih baik lagi di tahun 2023 dan pengangguran terus turun di tahun depan. Sebab, Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya sudah menganggarkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk menggerakkan UMKM. "Insya Allah, dengan guyub dan rukun ini, maka Surabaya bisa lebih hebat lagi di tahun 2023, laju ekonominya meningkat, dan pengangguran terbukanya terus turun. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa yang berhasil menaikkan ekonomi dan menurunkan pengangguran bukanlah wali kotanya, tapi warga Kota Surabaya yang memiliki sinergitas yang sangat hebat. Sekali lagi, terima kasih," pungkasnya. (rmt/rek)



KIPRAH DPRD JATIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Komisi B DPRD Jatim Minta Pemerintah Usut Kelangkaan dan Mahalnya Harga Beras

HARGA beras mengalami peningkatan beberapa pekan terakhir. Bahkan meski memasuki panen raya, namun harga komoditas ini tak juga kunjung turun. Anehnya, stok beras di pasaran pun langka, hingga diketahui pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) menyikapi anomali yang terjadi pada masyarakat ini. Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto menyebut, ada beberapa faktor yang membuat harga beras ini meningkat dan stoknya langka. Yang pertama adalah produksi yang terus mengalami penurunan. "Produksi yang turun ini bukan sepenuhnya kesalahan Jawa Timur, tapi juga pusat. Salah satunya adalah pasokan pupuk subsidi yang terus dikurangi. Sehingga ketika saat musim tanam tiba, pupuknya langka. Nah inilah yang membuat produksi padi tidak maksimal," ujarnya kepada Radar Surabaya, Kamis (23/2). Politisi Partai Gerindra Jatim ini mengatakan, pemerintah mengklaim bahwa subsidi pupuk cukup, namun realitanya petani mengeluhkan tidak mendapat pasokan pupuk. "Realitanya memang demikian, setiap kali reses yang dikeluarkan petani adalah masalah pupuk," katanya. Faktor berikutnya adalah pembangunan jalan tol di area lahan produktif yang tanpa memikirkan dampaknya. Menurutnya, banyak sawah yang ada di pinggir jalan tol ini produksinya tidak maksimal karena saluran airnya ter-



Noer Soetjipto
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur

tutup oleh jalan tol. "Bukan kita tidak mendukung pembangunan infrastruktur, hanya saja juga harus diperhatikan juga kondisi saluran air di sekitar ketika akan membangun," tuturnya. Selain itu, Dinas Pertanian juga tidak menyediakan anggaran untuk peningkatan produksi padi. Pria yang akrab disapa Cip ini mengatakan, dinas terkait berdalih anggaran dipotong. "Jadi anggarannya hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian hanya gaji pegawai dan operasional saja. Pemerintah juga harus memperhatikan lahan pertanian berkelanjutan. Artinya, boleh saja dijual tapi juga harus digunakan untuk lahan pertanian. Ini yang harus berani diakui oleh dinas kalau setiap tahun produksi padi kita terus mengalami penurunan," jelasnya. Menurutnya, satu hal lagi kenapa pasokan beras mahal dan susah ditemukan, karena adanya permainan rente. Artinya, lanjut Cip, oknum tengkulak ini memainkan pasokan dan harga. "Padahal dari petani harganya ya segitu-gitu

aja, naik turunnya harga justru ditentukan oleh tengkulak. Tujuan mahalnya harga beras ini agar kran impor beras bisa terbuka. Nah pemerintah bersama jajaran seharusnya berani meniadakan oknum-oknum yang melakukan permainan rente ini," katanya. Peraturan tentang impor beras tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur. Kemudian, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Amar Syaifudin. Ia menyebut mahalnya harga beras ini ada permainan dari oknum tengkulak. "Ada mafia yang bermain dalam hal ini. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah satgas pangan. Harapan kami satgas pangan ini kerjanya maksimal," katanya. Politisi PAN ini menduga ada main mata oknum-oknum tertentu terhadap mahalnya harga beras ini. Pasalnya, lanjut Amar, justru menjadi aneh ketika Jatim ini disebut lumbung pangan tapi stoknya langka dan harganya mahal. "Nah kalau di Lamongan setahu saya, hasil produksi beras ini didistribusikan ke Jawa Tengah. Nah masalah kelangkaan dan mahalnya harga beras ini harus segera ditangani apalagi sebentar lagi puasa dan lebaran, kasihan masyarakat kecil," tuturnya. (mus/nur)

Raperda 2043 Ditargetkan Selesai RTRW Tahun 2023 Tahun Ini

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) akan mengajukan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2023 ini. Dari jumlah tersebut, targetnya 60 persen tuntas dan disahkan menjadi peraturan pada tahun ini. "Pengajuan 24 raperda untuk dilakukan pembahasan pada tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2022 kemarin. Jadi kalau tahun kemarin dari 22 raperda yang diajukan untuk dilakukan pembahasan, ada 14 yang sudah selesai dan disahkan menjadi perda. Targetnya tahun ini 60 persen atau 15 raperda harus selesai dan disahkan," ujar anggota Bapemperda DPRD Jatim Daniel Rohi, Kamis (23/2). Lebih lanjut anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP mengatakan, dari 24 raperda yang diajukan untuk dilakukan pembahasan tahun ini, komposisinya terdiri dari 12 raperda merupakan inisiatif dari DPRD Jatim, dan yang 12 lagi merupakan raperda usulan dari eksekutif (Pemprov Jatim). Raperda yang merupakan inisiatif atau usulan dari DPRD Jatim antara lain, ada Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, Perda perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kemudian ada perda tentang keprotokolan, perda tentang perlindungan petani garam, perda tentang Kepelabuhanan, perda tentang pengelolaan pertambangan, perda tentang pelestarian seni dan budaya, perda tentang penanggulangan bencana. Adapula perda tentang penyelenggaraan keolahragaan, perda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan perda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sedangkan raperda yang merupakan usulan dari eksekutif antara lain perda tentang pengelolaan keuangan, Perda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang



Daniel Rohi
Anggota Bapemperda DPRD Jatim

Badan Usaha Milik Daerah, Perda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, perda pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perda tentang pengembangan dan perlindungan pertembakauan di Jawa Timur. Kemudian ada juga perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043, Perda Satu Data, Perda Pajak daerah dan retribusi daerah, Perda perubahan ketujuh atas peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyerahan Modal, Perda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2022, Perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023, dan Perda anggaran Pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. "Dari raperda yang akan dibahas itu ada beberapa yang sudah pasti untuk disahkan karena sudah rutin, seperti APBD, pertanggungjawaban, PAK dan beberapa lainnya," katanya. Kemudian juga, ada beberapa perda yang ditargetkan untuk selesai pada tahun ini, yaitu Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2023-2043. "Perda pertembakauan mungkin juga bisa selesai pada tahun ini. Meski demikian, tidak dipungkiri jika memang ada beberapa Perda yang susah terealisasi pada tahun ini. Salah satunya adalah Perda tentang perlindungan petani garam," pungkasnya. (mus/nur)